



BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN RENCANA AKSI TRIWULAN III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



2025

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi Organisasi	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
1.4 Analisis Lingkungan Internal	8
1.4. Sasaran Renstra	15
BAB II RENCANA AKSI.....	16
2.1 Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
2.2.1 Perjanjian Kinerja Esselon II.....	18
2.2.2 Perjanjian Kinerja Esselon III	19
2.2.3 Program dan Kegiatan	28
BAB III PENCAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI.....	49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2 Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.	6
Tabel 1.2	Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	7
Tabel 1.3	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	11
Tabel 1.4	Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2025	12
Tabel 2.1	Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 2.5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 2.6	Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera	25
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera	27
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	50

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025.....	45
--	----

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pergub No.25 Tahun 2018	10
Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai	13

KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Aksi Bappeda Tahun 2025 Triwulan III berisi Rencana Aksi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Rencana Aksi Bappeda Tahun 2025 Triwulan III Bappeda Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Aksi Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026

Palembang,

2025

KEPALA BAPPEDA



REGINA ARIYANTI, S.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712042002122003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi dan Misi Organisasi

Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah **"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025"** dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2025-2026.

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Daerah Proses Bisnis Tahun 2019 Nomor 25);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan seperti pada tabel 1.1, yaitu:

Tabel 1.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,25	7,30	7,35
		Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	-	80%-95%	80%-95%
	● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	%	100%	100%	100%
	● Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	80%-95%	80%-95%	80%-95%

Tabel 1.2
Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
					2025
1	2		3	4	8
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,30
			Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Nilai	80%-95%
			Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan Daerah	Perscn	100%
		● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
		● Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Perscn	80%-95%

1.4 Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan;
- 2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- 3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.

3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

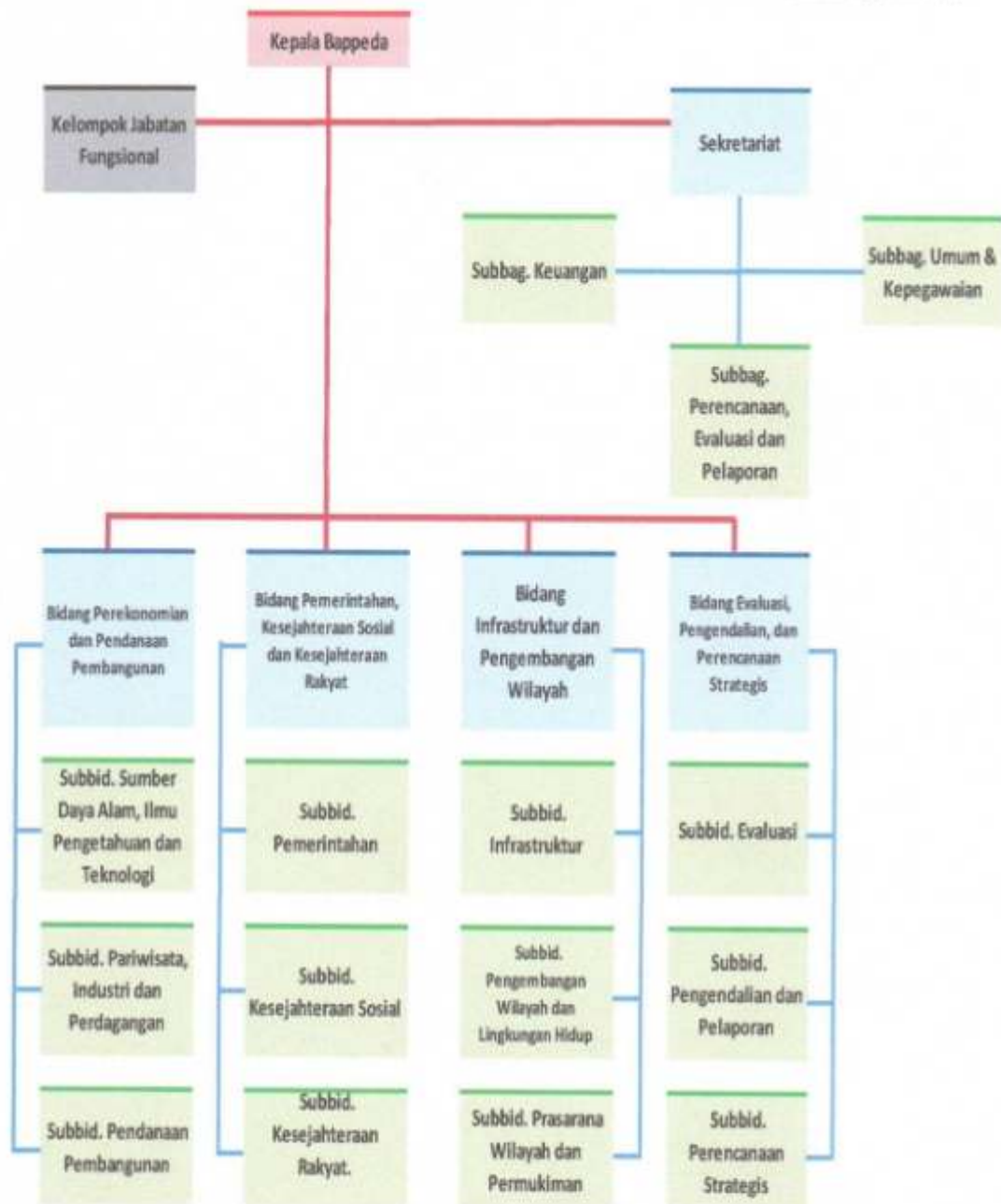
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

1.4.1 Sumber Daya Manusia Berkualitas

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan Tahun 2025 tercatat adalah sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan sebanyak 72 orang dan ASN laki-laki sebanyak 60 orang, dengan rincian pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	11	14	25
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	4	6	10
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan	7	10	17
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	9	1	10
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4	7	11
7	Kelompok Jabatan Fungsional	25	34	59
8	Jumlah	60	72	132

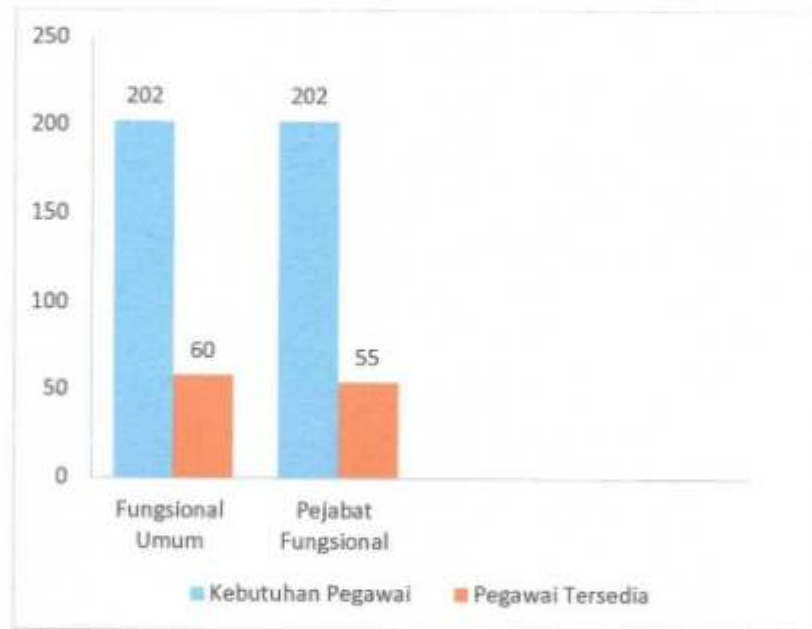
Tabel 1.4
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Golongan																			
		II				III								IV							
		C		D		A		B		C		D		A		B		C		D	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala															1					
2	Sekretariat		1	1		3	1			1	4	5	6	1			1				
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis						1		2	2		1	1	1	2						
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					1	3				4	2	3		3						
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat							1		1	1	2			4		1				
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										3	4	3			1					
7	Kelompok Jabatan Fungsional					15	21		2	3	7	1		2	4	3					3
8	Jumlah		1	1		19	26	1	4	7	18	15	13	4	13	5	2				3

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		SLTA		D3		S1		S2		S3	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala						1				
2	Sekretariat	1		1	2	5	7	4	4		
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis					2	1	2	3		
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					2	5	4	5		
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat					3	1	6			
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					3	3	1	2		
7	Kelompok Jabatan Fungsional					15	29	9	6	2	1
8	Jumlah	1		1	2	30	49	26	20	2	1

Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) Bappeda yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kebutuhan Pegawai, kebutuhan pegawai Bappeda adalah sebanyak 425 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, Jabatan Fungsional 202 orang dan Pelaksana 202 orang.



Gambar 1.2
Kebutuhan Pegawai

1.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan. Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian. Perumusan isu strategis :

Tabel 1.6
Perumusan Strategis

No	Telaah	Perumusan Isu Strategis
1	Belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam merencanakan pembangunan yang sejalan dengan nasional dan daerah	Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
2	Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada Tahun 2019-2023, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja Tahun 2020 yaitu RKPD Tepat Waktu.	
	Belum optimalnya kualitas substansi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan di Sumatera Selatan	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
	Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	Mengoptimalkan proses penyusunan Ranhir RKPD Provinsi sesuai dengan kalender perencanaan
	Belum optimalnya penyampaian laporan triwulanan OPD Tepat Waktu	Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
	Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang mengajukan fasilitasi RKPD tepat waktu	Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

1.6 Sasaran Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru mengacu pada rencana pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang tersusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2026.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan.
- b. Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu Persentase capaian Sasaran Daerah yang sesuai dengan target.

BAB II

RENCANA AKSI

Penyusunan Laporan Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/Renaksi dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025																			
Kategori Aksi	Output (Rp)					Total Anggaran													
	TARGET	Realisasi (%)	Capaian (Rp)	Saluran	Indikator	TARGET	Realisasi (%)	Capaian (Rp)	TARGET Realisasi (%)	Realisasi (%)	Capaian (Rp)	Justifikasi Anggaran	TARGET Anggaran	Realisasi	Capaian (Rp)	Realisasi	Capaian (Rp)	Realisasi	Capaian (Rp)
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	11	12	13.88	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	100%	22.27%	22.27	permanen	Perencanaan dan pelaksanaan anjak piutang terdampak covid	Rp. 23.479.822.890	Rp. 5.382.118.129				Rp. 142.558.800	Rp. 142.558.800	Rp. 142.558.800	Rp. 142.558.800	Rp. 46.512.400	31.50	Rencana Anggaran		
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	100%	66.67%	66.67	permanen	Perencanaan dan pelaksanaan anjak piutang terdampak covid	Rp. 110.000.000	Rp. 66.750.750				Rp. 142.225.000	Rp. 142.225.000	Rp. 142.225.000	Rp. 66.750.750	67.94	Rencana Anggaran			
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	80%	1.19%	2.87	permanen	Perencanaan dan pelaksanaan anjak piutang terdampak covid	Rp. 890.000.000	Rp. 13.897.330				Rp. 1.19.942.080	Rp. 1.19.942.080	Rp. 1.19.942.080	Rp. 146.754.514	27.50	Rencana Anggaran			
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	100%	2.30%	2.30	permanen	Perencanaan dan pelaksanaan anjak piutang terdampak covid	Rp. 2.042.004.000	Rp. 56.302.680				Rp. 3.386.101.300	Rp. 3.386.101.300	Rp. 3.386.101.300	243.312.072	21.80	Rencana Anggaran			
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													
Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid	0%	0.00%	0	permanen		Rp. 408.000.000	-				Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0	Rencana Anggaran			
	Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid					Upaya pemenuhan kewajiban anjak piutang kepada pengusaha kecil dan menengah yang terdampak covid													

[illegible]

2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin di capai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% -95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

1.2 Perjanjian Kinerja Esselon II

Berdasarkan tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang ditetapkan. Pertama, tersusunnya laporan penilaian, evaluasi, serta fasilitasi perencanaan pembangunan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya meliputi jumlah laporan penilaian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan dengan target sebanyak 8 dokumen, serta jumlah tulisan atau narasi yang disusun sebagai bahan untuk buletin dan jurnal di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah diedit dengan target sebanyak 3 dokumen. Kedua, tersusunnya laporan ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi kebijakan maupun makalah kebijakan perencanaan pembangunan dengan fokus pada tematik kemiskinan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah jumlah laporan ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi

kebijakan perencanaan pembangunan tematik kemiskinan dengan target satu dokumen.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80%-95%

1.3 Perjanjian Kinerja Esselon III

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, terdapat empat sasaran strategis utama yang ditetapkan. Pertama, peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda dengan indikator nilai SAKIP yang ditargetkan mencapai AA (91,63). Kedua, peningkatan realisasi keuangan Bappeda melalui persentase realisasi program dan kegiatan dengan target 98,09%. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan penunjang ASN yang diukur melalui Indeks Profesionalisme ASN dengan target kategori Tinggi. Keempat, terlaksananya pengelolaan arsip dengan indikator hasil audit sistem kearsipan yang ditargetkan memperoleh nilai AA (Sangat Memuaskan).

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	AA (91,63)
2	Meningkatnya Realisasi Keuangan Bappeda	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda	98,09%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Tinggi
4	Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik	Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal	AA (Sangat Memuaskan)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Fokusnya mencakup keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas, partisipasi masyarakat, serta peran akademisi dalam penyusunan RKPd, masing-masing dengan target capaian 100%. Selain itu, ditetapkan pula sasaran peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target capaian 80%-95%.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan
Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keterkaitan antar dokumen perencanaan dan pendanaan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (Renstra OPD, RKPd - RPJMD, RKPd Provinsi - RKPd Kabupaten/Kota, RPJPD (RPJPN) pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan pembangunan pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan	Persentase lokasi pembangunan mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang tepat sasaran	100%

	pembangunan yang tepat sasaran		
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah	Persentase program prioritas daerah RKPD yang didanai secara sinergi dan integratif	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam	Persentase capaian perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80–95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Target yang ditetapkan meliputi keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta masukan akademisi dalam penyusunan RKPD, seluruhnya dengan capaian 100 persen. Selain itu, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra infrastruktur ditargetkan mencapai 80%-95% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	100%

	Tepat Sasaran		
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang didanai secara sinergi dan terintegrasi	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	100%
5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan Prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat tujuh sasaran strategis. Sasaran tersebut mencakup peningkatan keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD, masing-masing dengan target capaian 100 persen. Selain itu, ditetapkan peningkatan peran akademisi dalam penyusunan RKPD dengan target 100%, pencapaian target program perangkat daerah sebesar 80%, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra dengan target 80%-90% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan
Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	100%
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang mendanai secara sinergi dan integratif	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang berbasis partisipasi masyarakat	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi	80%
7	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat delapan sasaran strategis. Fokusnya diarahkan pada keterkaitan antar dokumen perencanaan,

ketepatan lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, partisipasi masyarakat, serta kontribusi akademisi dalam penyusunan RKPD dengan capaian target 100 persen. Selain itu, sinkronisasi dokumen SDGs dan integrasi rencana penanggulangan kemiskinan daerah juga ditetapkan dengan target 100 persen, sementara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra ditargetkan 80–95 persen.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat
Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJMD-RPJPD) pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Persentase lokasi pembangunan Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	100%
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase program prioritas daerah RKPD Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Rasio kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang berbasis partisipasi	100%
5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%

6	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%
7	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi	100%
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tinggi dan sangat tinggi	80%–95%

2.2.3 Program dan kegiatan yang mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Bappeda Tahun 2025

No.	Program /Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.33
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKJP, Saktip dan RB Bappeda)	100.00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	85.39
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji, 19 org)	85.33

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,236,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administratif+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	98.19
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	75.81
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,550,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	100.00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100.00
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45,320,000	Kota Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	82.13
8	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakuan Dinas Beserta Atribut kelengkapan	155 Paket	0.00
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.00
11	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	90.00
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	72.53

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	72.74
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	90.00
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0.00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor, 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	77.63
16	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	87.09
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Paktaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,048,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.00
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	68.16
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	0.00	Kota Palembang			0.00
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00
1.7	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	1,514,000,000	Kota Palembang	Percentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	84.91
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	84.61
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	100.00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	83.28
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1,209,281,390	Kota Palembang	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	90.26

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,000,000	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	91.30
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243,588,340	Kota Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkap kan kantor)	92.70
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735,693,050	Kota Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	89.13
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	2,847,848,693	Kota Palembang	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	95.92
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,603,754,700	Kota Palembang	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat	88%	96.49

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
				waktu		
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	178,494,238	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	98.32
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	62,293,638	Kota Palembang	Jumlah Telah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi SumSel Tahun)	100.00
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	531,600,000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029)	100.00
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	831,366,824	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029)	93.59

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192,923,105	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	100.00
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167,949,000	Kota Palembang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	100.00
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24,974,105	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Paritdag; Database Bidang Infrastruktur)	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	94.29
34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	98,076,250	Kota Palembang	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SIP	100.00
35	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	100.00
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	80.77
37	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada Rkpd	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja	TARGET Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
					Kab/Kota 2026, 1 Dok Fasilitasi Raperkenda Rkpd Perubahan 2025 Kab/Kota, 1 Dok Fasilitasi Ranwal Ranperda Rpjmd Kab/Kota 2025- 2029, 1 Dok Fasilitasi RAPERDA RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota, 1 Dok Hasil Penilaian Ppd Kab/Kota)	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,883,428	kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	98.10

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	96.64
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan KKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan KKPD)	1 Dokumen	100.00
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan KKPD)	55,250,564		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,460,296	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95,654,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178,490,399	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	83.19
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,470,613		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58,670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100.00
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325,691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	100.00
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	100.00

No.	Program / Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	100,00
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52,097,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	100,00
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	100,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Ketuntasan (%)
1	2	3	4	5	6	8
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	100.00
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	100.00
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,597,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100.00

No.	Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja	TARGET Keunggulan (%)
1	2	3	4	5	6	8
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,203,802	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100.00
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74,155,390	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	100.00
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	768,628,112	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	98.09

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,926,125	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	100.00
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72,391,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	100.00
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82,426,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	96.73
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89,956,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/ RPJM N pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	100.00

No.	Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	148,991,422	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen	98.32
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84,158,750	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	97.03
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	82,356,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	8
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJM N pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)	94.42
Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan		38,387,144,866				86.03

BAB III

PENCAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sedangkan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator 1 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase kesesuaian sasaran antar dokumen dipakai untuk tahun 2025 dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 100%. Indikator 2 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 70%, adapun capaian indikator kinerja utama pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Capaian
1		2	3	4	5
1.	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57,71%
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% -95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	64,72%

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 38.387.144.866,- dengan Realisasi anggar per 1 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp. 23,023,783,695.00,- atau sebesar 59.98%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Pervyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi			Tertibuan d. Fisik	Ket
								Kemampuan		Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	(Rp)	(%)	(%)	12	13
1	PROGRAM PENONJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	86,46	84,33	20,975,395,808,00	63,20	76,06	68,26	
1.1	Perencanaan, Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0,37	100,00	44,539,402,00	31,59	70,00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, Ljkr, Skap dan KB Buproc-da)	0,37	100,00	44,539,402,00	31,59	70,00	0,26	
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	68,47	85,39	18,467,113,067,00	70,27	84,50		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji, 19 org)	66,88	85,33	18,069,437,887,00	70,39	85,00	56,84	
3	Pervyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,230,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pervyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tugas bekerja administrasi+ 1 SPK Tugas Tutor SKL)	0,70	98,19	241,142,000	89,57	95,00	0,67	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	0,74	75,81	127,254,000,00	44,94	78,00	0,58	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,250,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0,15	100,00	29,279,180,00	50,88	80,00	0,12	
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perangkat Daerah yang Terlengkap	100%	0,38	100,00	98,730,750,00	67,94	100,00		
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45,200,000	Kota Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,26	100,00	98,730,750,00	98,73	100,00	0,26	
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapaletannya	80%	1,33	82,13	140,734,338,00	27,55	82,50		
8	Pengadaan Pakuan Dinas Berserta Atribut Keengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakuan Dinas Berserta Atribut Keengkapannya	155 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,17	100,00	39,505,003,100	59,14	80,00	0,14	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,22	100,00	78,439,000,00	94,40	95,00	0,21	

11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0.12	90.00	22,790,287.00	260.63	70.00	0.08	
12	Himbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Himbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0.82	72.53	0.00	0.00	85.00	0.70	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	8.82	72.74	743,312,072.00	21.95	60.00		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.52	90.00	138,687,000.00	79.34	85.00	0.44	
14	Penyediaan Pelatihan dan Peningkatan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Pelatihan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor, 50 paket makan minum, rapat dan kunjungan tamu)	1.32	77.63	171,380,701.00	33.79	75.00	0.99	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	16 Paket	0.50	87.09	96,148,000.00	49.14	70.00	0.35	
17	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakuan Dinas Bekerja Aktifitas Kedeputian	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,038,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	2.05	100.00	300,859,921.00	38.28	65.00	1.33	

19	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000		Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan brochure)	0.61	68.16	17,236,450.00	7.37	65.00	0.40	
1.6	Pengejaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.00		Kota Palembang			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00		Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,514,000,000		Kota Palembang	Persentase Administrasi Terlaksana	100%	3.94	84.91	947,322,240.00	62.57	68.75		
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000		Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengaduan surat)	0.03	100.00	3,002,900.00	30.03	53.00	0.01	
22	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000		Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pembebanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	2.14	84.61	520,069,340.00	63.37	75.00	1.61	
23	Penyediaan jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor	72,000,000		Kota Palembang	Jumlah Laporan Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (laporan jasa alat kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan)	0.19	100.00	39,000,000.00	54.17	70.00	0.13	
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	6,10,000,000		Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (laporan biaya honor yang diberikan; lap pengumuman honor; surat-surat dan dokumentasi)	1.59	83.28	380,250,000.00	63.16	73.00	1.19	

1.8	Penelitian Berang Milik Daerah Penjangkauan Pemerintah Daerah	Kota Palembang	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	3,15	90,26	533,643,939.00	44,13	66,67	2,10	
2.5	Penyediaan dana penelitian, biaya penelitian, pajak dan perlakuan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	26 Unit	0,60	91,30	82,688,991.00	35,95	60,00	0,36	
2.6	Penelitian Persatuan dan Mesin Lainnya	Kota Palembang	Jumlah Persatuan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 109 unit persatuanpersatuan glapuan karier)	0,63	92,70	138,003,620.00	64,87	85,00	0,54	
2.7	Penelitian/pekerjaan dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1,92	89,13	292,952,228.00	39,82	53,00	1,03	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Kota Palembang	Persentase Capaian Sarana Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	7,42	96,92	1,288,937,876.00	45,36	64,72	5,65	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Palembang	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	4,18	96,49	894,270,225.00	53,76	77,50		
2.8	Kelembagaan Penelitian Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah dengan Dokumen kelembagaan Lainnya	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Kelembagaan Awal RKPD/RKPD (Secara kelembagaan jika RKPD tidak Kelembagaan Teknokratis)	1 Dokumen Kelembagaan Teknokratis RKPD Tahun 2025-2030;	0,46	98,42	0,00	0,00	25,00	0,12	

29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palembang	Jumlah Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumatera Timur)	0,16	100,00	19.786,200,00	31,76	100,00	0,16	
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RSPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2023-2029)	1,38	100,00	460,537,700,00	86,63	100,00	1,38	
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan	3 DOK (1 DOK RSPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RSPD 2023, 1 DOK RPJMD 2023-2029)	2,17	93,59	413,946,325,00	49,79	85,00	1,84	
2.2	Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0,30	100,00	61,419,830,00	31,84	50,00		
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palembang	Jumlah Monev Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Gemu Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	0,44	100,00	61,419,830,00	30,37	30,00	0,22	
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perdagangan, Database Bidang Infrastruktur)	0,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	2,74	94,29	333,247,821,00	31,70	66,67		
3.4	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	96,076,250	Kota Palembang	Tertindakannya Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPKP	0,26	100,00	32,132,260,00	32,76	60,00	0,15	
3.5	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaan	1 Kerja Sama	0,13	100,00	4,076,700,00	8,45	20,00	0,03	
3.6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,090,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0,81	80,77	115,901,520,00	37,15	70,00	0,57	

37	Penelitian/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	202,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Kota yang Diteliti/Evaluasi	3 DOKUMEN 1 DOK FASILITASI KAMPERSADA RPKD KAB/KOTA 2026, 1 DOK FASILITASI KAMPERSADA RPKD 2025 KAB/KOTA, 1 DOK FASILITASI RANWAL KAMPERSADA RPKD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI KAMPERSADA RPKD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI KAMPERSADA RPKD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK EVALUASI KINERJA PEMANGGILAN KAB/KOTA, 1 DOK HASIL PENILAIAN PTD KAB/KOTA)	1,34	100,00	181,137,241,00	30,55	70,00	1,08
2,4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Jernyutan Pembangunan Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,683,428	Kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	6.12	98.10	739,450,011.00	32.30	57.71	3.69
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.32	96.64	252,922,054.00	28.35	57.50	
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinasi Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.16	100.00	13,217,710.09	21.53	60.00	0.10
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,250,564		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.14	100.00	5,200,000.00	9.41	35.00	0.08

42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,15	100,00	2,150,484,000	3,658	50,00	0,08	
43	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Instruksi/Ketja dengan RPJPD/RPUMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,25	100,00	3,194,000,000	5,43	55,00	0,14	
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (PS-IPD, RPUMD dan RSKPD)	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPUMD dan RSKPD)	1 Dokumen	0,46	83,19	30,061,410,000	16,84	55,00	0,26	
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (PS-IPD, RPUMD dan RSKPD)		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,15	100,00	6,420,000,000	10,98	60,00	0,09	

46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,15	100,00	13.125.000,00	22,37	60,00	0,09	
47	Koordinasi Pelaksanaan Sidergris dan Harimobil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325.691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Studi/riset Berasak/Renja dengan RKPD/RKMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	0,45	100,00	177.555.450,00	54,52	65,00	0,55	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RKMD	81%	1,80	100,00	237,319,895,00	34,39	57,50		
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RKPD, RKMD, RSNPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan yang Dilengkapi Penyusunan (RKPD, RKMD dan RSNPD)	1 Dokumen (1 Dok Berangka Mado Ekonomi Daerah)	0,62	100,00	139.535.971,00	58,67	70,00	0,43	

49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	52,997,008	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	5 Laporan	0.14	100.00	3,396,600.00	6.52	50.00	0.07	
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
51	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Berbasis/Kerja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan (1 Lapp Integrasi dan sinkronisasi perencanaan portofolio investasi dan ekonomi bernyisat)	0.54	100.00	60,591,221.00	29.17	65.00	0.35	
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP/MD, RK/MD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunanya (RP/MD, RK/MD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Perencanaan Strategis) Pengembangan SDA	0.08	100.00	13,100,985.00	41.83	65.00	0.05	

53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.07	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
55	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana dengan RKPD/RRUMD pada Bidang SDA	1 Laporan (lap hasil integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan BTEB)	0.19	100.00	21,605,118.00	29.26	60.00	0.12	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.00	98.09	269,208,062.00	35.02	58.13		
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (REMIT, RPJMD dan RKPD)	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disinkronisasi Perencanaan (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	0.22	100.00	2,709,000.00	3.37	60.00	0.13	

57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0,19	100,00	16,458,440,00	22,74	55,00	0,10	
58	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0,21	96,73	22,309,100,00	27,07	55,00	0,12	
59	Koordinasi Pelaksanaan Sivertias dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/RKPD dengan Rencana/RPD/PP-IPD/RKP /RUMK pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0,23	100,00	51,288,799,00	57,02	60,00	0,14	
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RUMK, RUMD, dan RUMD)	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Di koordinir Penyusunan (RUMK, RUMD dan RUMD)	2 Dokumen	0,39	98,32	41,266,759,00	27,70	55,00	0,21	
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	0,22	97,03	33,484,368,00	39,79	35,00	0,12	

6.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	82.356.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	1 Laporan	0.21	100.00	5,692,496.00	6.91	50.00	0.11	
6.3	Koordinasi Pelaksanaan Struktur dan Hierarki Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Strukturisasi Regra/RKPD dengan Rencana/RPD/RKPD/RSKP /RKMD pada Bidang Kesejahteraan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi, Jumlah Pelaksanaan Infrastruktur, Jumlah Laporan yang diterima)	0.33	94.42	95,999,100.00	76.34	73.00	0.25	
	Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan	38,387,144,866				100.00	86.03	23,023,783,695.00	59.98	66.16	77.50	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Dengan tersusunya rencana aksi pencapaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sumatera selatan Triwulan II Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah di targetkan

Palembang, 2025

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198712042002122